

# PENGUNAAN KONSEP *GENERAL PRICE-LEVEL ACCOUNTING* DALAM MENILAI RELEVANSI LAPORAN KEUANGAN SUATU PERUSAHAAN

Mursalin \*)

## ABSTRAK

Sebagai negara yang menganut ekonomi terbuka, Indonesia memiliki masalah inflasi dari tahun ke tahun. Sementara pencatatan akuntansi di Indonesia umumnya menganut *historical cost*, dimana konsep ini tidak mengenali adanya perubahan seperti pengaruh inflasi tetapi *stable monetary unit* yang mengakibatkan semua transaksi yang terjadi dicatat atas dasar nilai historis atau nilai yang didapat saat terjadi transaksi. Ini menyebabkan dilema relevansi laporan keuangan perusahaan. Untuk para investor dan pemain saham, untuk mengetahui ketahanan perusahaan untuk menghadapi persaingan dan moneter yang tidak dapat diprediksi, laporan tambahan berupa *general price-level accounting* atau dikenal sebagai akuntansi tingkat harga umum sangat dibutuhkan. Konsep ini menyatakan bahwa nilai sesungguhnya dari rupiah ditentukan oleh barang atau jasa yang dapat diperoleh, yang biasa disebut daya beli. Dalam masa inflasi ataupun deflasi, jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh berubah dengan nilai uang nominal yang konstan, yang berarti bahwa daya beli rupiah berubah. Dengan adanya laporan tambahan ini tujuan dari pelaporan akuntansi dapat dipenuhi, yaitu sebagai rujukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Kata Kunci: Akuntansi Inflasi, *Historical cost*, *General Price-Level Accounting*.

### A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Masalah umum yang sering dihadapi sebagai negara berkembang adalah tingginya tingkat inflasi. Sejak krisis moneter tahun 1998 hingga saat ini harga-harga di pasaran cenderung naik.

Pada saat ini pasar modal menjadi primadona yang dipilih investor untuk meninvestasikan modalnya. Namun untuk menginvestasikan modal dalam saham tidak semudah membalik telapak tangan. Investor harus mengetahui kemampuan perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Bagaimana ketahanan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan dan moneter yang sulit diprediksi. Informasi mengenai suatu

perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal dapat diketahui melalui laporan keuangannya.

Laporan keuangan merupakan informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Informasi laporan keuangan dianggap memiliki nilai kualitas informasi jika memenuhi dua unsur yaitu dapat diandalkan (*reliable*) dan tepat waktu (*relevance*) bagi pengguna laporan keuangan.

Uniknya pencatatan akuntansi di Indonesia menganut sistem akuntansi konvensional dimana laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis (*historical cost*) yang mengasumsikan bahwa harga-harga (unit moneter) adalah stabil. Akuntansi konvensional tidak

---

\*) Dosen Tetap FE Univ-PGRI Plg

menagakuai adanya perubahan tingkat harga umum maupun perubahan tingkat harga khusus. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli seperti pada periode inflasi, maka laporan keuangan jika kita kembali pada penjelasan diatas secara ekonomis tidaklah relevan.

Untuk mengatasi hal ini akuntansi inflasi menjadi suatu pedoman yang dapat diandalkan dalam menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam artikel ini akuntansi inflasi yang dibahas adalah *general price-level accounting* (GPLA).

## B. LANDASAN TEORI

### 1. INFLASI

Secara umum pengertian inflasi adalah suatu proses kenaikan harga barang dan jasa termasuk faktor-faktor produksi secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu dalam suatu perekonomian serta dapat diukur dengan satuan mata uang.

Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang dan jasa termasuk faktor-faktor produksi, diukur dengan satuan mata uang yang semakin naik terus-menerus. (Na'im, 2001). Selanjutnya, inflasi adalah suatu proses kenaikan harga barang yang berlaku dalam perekonomian. (Sukirno, 2002).

Banyak studi mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa inflasi semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur

ekonomi negara-negar berkembang pada umumnya masih bercorak agraris. Sehingga, guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal penggantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*, utang luar negeri, dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar dalam negeri.

Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala structural dalam perekonomian di negara berkembang, sering disebut dengan *structural bottlenecks*. *Structural bottlenecks* terutama terjadi dalam tiga hal (Admadja, 1999), yaitu :

- a. Pengeluaran pemerintah terbatas. Hal ini disebabkan oleh sektor penerimaan rutin yang terbatas, yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan, akibatnya timbul defisit anggaran belanja, sehingga seringkali menyebabkannya pinjaman dari luar negeri ataupun mungkin pada umumnya dibiayai dengan pencetakan uang (*printing of money*).
- b. *Supply* dari sektor pertanian (pangan) tidak elastis. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi *supply* dari sektor

pertanian domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya.

- c. Cadangan valuta asing yang terbatas (sedikit) akibat dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impor. Keterbatasan cadangan valuta asing ini menyebabkan kemampuan untuk mengimpor barang-barang baik bahan baku, input antara, maupun barang modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri menjadi terbatas pula. Belum lagi ditambah dengan adanya *demonstration effect* yang dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Akibat dari lambatnya laju pembangunan sektor industri, seringkali menyebabkan laju pertumbuhan *supply* barang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan permintaan.

Dengan adanya *structural bottlenecks* ini, dapat memperparah inflasi di negara berkembang dalam jangka panjang. Oleh karena itu fenomena inflasi di negara-negara yang sedang berkembang kadangkala menjadi suatu fenomena jangka panjang, yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek.

## 2. HISTORICAL COST

Sudah dibahas pada pendahuluan bahwa dunia usaha pada umumnya selalu mendasarkan diri pada *historical cost* yaitu asumsi adanya *stable monetary* unit yang mengakibatkan semua transaksi yang terjadi

dicatat atas dasar nilai historis atau nilai yang di dapat saat terjadi transaksi. Di sisi lain disadari pula bahwa *stable monetary* unit tersebut pada kenyataannya tidak ada, apalagi pada negara yang menganut ekonomi terbuka seperti Indonesia.

Penggunaan nilai historis dalam akuntansi keuangan disebabkan karena beberapa alasan (Harahap, 2007) :

- a. Relevan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Bagi manajer dalam membuat keputusan masa depan diperlukan data transaksi masa lalu.
- b. Nilai historis yang didasarkan pada data obyektif dapat dipercaya, dapat diaudit dan lebih sulit memanipulasi bila dibandingkan dengan nilai yang lain seperti *current cost* atau *replacement cost*.
- c. Karena telah disepakati berlakunya standar akuntansi pada penggunaan nilai historis memudahkan untuk melakukan perbandingan baik antara industri maupun antar waktu suatu industri.

Kelemahan penggunaan nilai historis (Harahap, 2007) antara lain :

- a. Adanya pembebanan biaya yang terlalu kecil karena pendapatan suatu hal tertentu pada saat tertentu akan dibebani biaya yang didasarkan pada suatu nilai uang yang telah ditetapkan beberapa periode yang lalu pada saat pencatatan terjadinya biaya tersebut.

- b. Nilai aktiva yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan harga beli uang terakhir. Di samping itu juga terjadi perubahan-perubahan kurs yang cepat atas aktiva dan passiva dalam valuta asing yang dikuasai perusahaan sehingga mengalami kesulitan dalam perhitungan selisih kurs yang tepat.
- c. Alokasi biaya untuk depresiasi, amortisasi akan dibebankan terlalu kecil dan mengakibatkan laba dihitung terlalu besar.
- d. Laba atau rugi yang terjadi yang dihasilkan oleh perhitungan laba atau rugi yang didasarkan pada asumsi adanya *stable monetary* unit tersebut tidaklah riil apabila diukur dengan perkembangan daya beli uang yang sedang berlangsung.
- e. Adanya *stable monetary* unit. Perusahaan tidak akan mempertahankan *real capital*-nya dan ada kecenderungan terjadinya kanibalisme terhadap modal sehubungan dengan pembayaran pajak perseroan dan pembagian laba yang lebih besar daripada semestinya.
- f. Menyalahi *mathematical principle* karena berbagai himpunan yang tidak sama dijumlahkan menjadi satu.
- g. Di samping hal-hal di atas akan timbul kesulitan-kesulitan bagi manajemen perusahaan apabila harus mendasarkan pada laporan akuntansi yang disusun atas dasar asumsi.

### 3. GENERAL PRICE-LEVEL ACCOUNTING (GPLA)

Di Indonesia, *general price-level accounting* dikenal sebagai akuntansi tingkat harga umum menyatakan bahwa nilai sesungguhnya dari Rupiah ditentukan oleh barang atau jasa yang dapat diperoleh, yang biasa disebut daya beli. Dalam masa inflasi atau deflasi, jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh berubah dengan dengan nilai nominal yang konstan, yang berarti daya beli Rupiah berubah. Akuntansi tingkat harga umum akan mengadakan penyajian kembali komponen-komponen laporan keuangan ke dalam Rupiah pada tingkat daya beli yang sama, namun sama sekali tidak mengubah standar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi berdasarkan nilai historis.

Penyesuaian atas besaran keuangan untuk inflasi guna mencerminkan nilai harga umum atau tingkat harga umum dan penggunaan nilai yang telah disesuaikan tersebut dalam akuntansi. Perubahan tingkat harga umum dapat dihitung atau diukur dengan indeks harga. Indeks harga yang biasa digunakan adalah indeks harga konsumen, yaitu suatu indeks yang menyajikan perubahan periodik dalam biaya kelompok barang-barang terpilih yang dibeli konsumen yang digunakan sebagai ukuran inflasi.

Penyusunan berdasarkan nilai historis disesuaikan menjadi berdasarkan tingkat harga umum dapat dilakukan dengan mengkonversi nilai historis dengan faktor konversi menjadi tingkat

harga umum, dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Faktor konversi} = \frac{\text{indeks sekarang}}{\text{indeks tahun dasar}}$$

Dalam penyusunan berdasarkan tingkat harga umum perlu diperhatikan pos-pos yang akan terpengaruh dengan adanya penurunan daya beli Rupiah (Harahap, 2007), yaitu :

- a. *Monetary assets*, seperti kas ditangan, surat-surat berharga, dan pos-pos piutang dan lain-lain sifatnya sebagai *dormant account* akan mengalami pengaruh penurunan daya beli secara berarti karena rekening-rekening tersebut tidak dapat lagi dinilai (*di-appraisal*).
- b. *Non monetary assets* secara riil tidak mengalami pengaruh penurunan daya beli, tetapi dari sudut akuntansi merupakan pos yang terkena pengaruh penurunan harga beli. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah yang serius karena rekening-rekening tersebut dapat dinilai.
- c. *Assets* dalam bentuk valuta asing tidak dipengaruhi oleh penurunan daya beli Rupiah karena dapat dinilai dengan kurs yang terakhir.

Kontroversi yang berkaitan dengan relevansi GPLA telah dan masih berlangsung hingga saat ini. Sejumlah argumentasi yang mendukung telah dikembangkan (Richard dan Myrte, 1995) adalah :

- a. Laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan tingkat harga umum atau dengan kata

lain disajikan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan perubahan kemampuan atau daya beli (*purchasing power*) dari bermacam-macam *asset* dan klaim dalam perusahaan. Sedangkan laporan yang disajikan berdasarkan tingkat harga umum menyajikan data yang mencerminkan *purchasing power* dari *asset* dan klaim mata uang tertentu pada akhir periode.

- b. *Conventional historical-cost accounting* tidak mengukur pendapatan (*income* dengan sewajarnya sebagai hasil *matching* Rupiah dalam laporan laba atau rugi. Beban-beban yang telah terjadi pada periode sebelumnya dikontraskan dengan pendapatan-pendapatan yang umumnya dicerminkan dalam nilai Rupiah tertentu pada saat ini. *General price-level accounting* menyediakan konsep *matching* pendapatan dan beban yang lebih baik karena menggunakan nilai uang konstan (*common value*).
- c. *General price-level accounting* relatif mudah diterapkan. Hanya sekedar mengganti 'nilai lama' dengan nilai saat ini'. *General price-level accounting* mencerminkan konsep terakhir dari prinsip akuntansi umum (*general accepted accounting principles*). Sebagai akibatnya, dirasa relatif lebih obyektif dan dapat diuji kebenarannya. Karakteristik tersebut yang menyebabkan *general price-level accounting* lebih dapat diterima di banyak perusahaan

dibanding *current-value accounting*.

- d. *General price-level accounting* menyediakan informasi yang relevan bagi manajemen dalam evaluasi dan penggunaannya. Jadi laba atau rugi berdasarkan tingkat harga umum dihasilkan dari penanganan item-item moneter yang merefleksikan respon manajemen terhadap inflasi. Pada akhirnya, *general price-level accounting* menyajikan pengaruh inflasi secara umum terhadap laba dan menyediakan hasil investasi (*rate of returns*) yang lebih realistis. Relevansi lebih berkepentingan dengan masa sekarang dan masa mendatang, karena itu informasi yang didasarkan pada nilai histories dianggap kurang relevan untuk tujuan pengambilan keputusan khususnya dalam kondisi ekonomi yang cenderung mengalami inflasi.

Di sisi lain, penolakan terhadap *general price-level accounting* didasarkan pada beberapa argumentasi (Harahap, 2007) sebagai berikut :

- a. Kebanyakan studi empiris mengidentifikasi bahwa relevansi dari informasi tingkat harga umum lemah atau dengan kata lain tidak dapat diterima. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan lebih dapat memberikan jaminan sebelum adanya kesimpulan yang dapat dicapai sehubungan dengan tingkat relevansi informasi tingkat harga umum dan kemampuan untuk

menginterpretasikan hal tersebut secara penuh.

- b. Tingkat harga umum merubah rekening hanya untuk perubahan dalam tingkat harga secara umum dan tidak merubah rekening ke dalam tingkat harga tertentu. Jadi penanganan laba dan rugi untuk *asset-asset* non-moneter tidak diakui dan para pengguna data yang disesuaikan pada tingkat harga umum mungkin mempercayai bahwa perubahan nilai-nilai telah berkorespondensi dengan nilai-nilai saat ini.
- c. Pengaruh atau akibat adanya inflasi akan berbeda dalam berbagai perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang insentif modal akan lebih dipengaruhi oleh inflasi disbanding dengan perusahaan-perusahaan yang dipenuhi dengan *asset-asset* jangka pendek.
- d. Biaya-biaya diimplementasikan lebih besar dari nilai pokoknya dalam *general level-price accounting* dibanding *benefit-nya*.

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standard Board (FASB)* di Amerika Serikat juga masih tidak memberikan kepastian mengenai perlu tidaknya penggunaan *general price-level accounting*, diantaranya:

- a. Statement No. 33 yang mengharuskan beberapa perusahaan tertentu untuk menyajikan informasi tambahan dengan menggunakan *general price-level accounting* dan *current cost accounting*.

- b. Statement No. 89 menyatakan bahwa informasi tambahan dengan *general price-level accounting* dan *current cost accounting* sebaiknya disajikan tetapi tidak diharuskan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia bahwa informasi tambahan antara lain mengenai pengungkapan pengaruh perubahan harga bersifat tidak mengikat.

### C. PEMBAHASAN

Laporan keuangan (*financial statement*) yang selama ini kita kenal adalah laporan yang lebih mengedepankan unsure keandalan (reliabilitas) daripada relevansinya. Oleh karena itu, salah satu prinsip penyusunan laporan keuangan digunakan adalah biaya historis (*historical cost*). Artinya, laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehannya (*historical cost*). Konsep ini mengabaikan adanya inflasi yang nyata-nyata terjadi pada setiap Negara. Inflasi akan mempengaruhi nilai dari setiap angka yang terjadi dalam laporan keuangan yang membuat informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi terdistorsi.

Seperti yang dibahas sebelumnya, GPLA merupakan

satu konsep akuntansi inflasi yang merubah satuan pengukuran, tetapi tetap mempertahankan model pelaporan atas dasar *historical cost*. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mempertahankan nilai modal menurut harganya yang tetap dengan ukuran indeks harga.

Dalam GPLA, akun-akun dalam laporan keuangan historis dikelompokkan menjadi pos moneter dan pos non moneter, kemudian diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya. Akun moneter tidak terpengaruh perubahan harga umum yang berlaku. Pemilikan akun-akun moneter akan menimbulkan keuntungan atau kerugian daya beli. Sebaliknya, akun non moneter terpengaruh perubahan harga, nilainya tidak mencerminkan tingkat harga umum yang berlaku, sehingga harus disesuaikan dengan suatu faktor konversi yang mencerminkan tingkat harga umum yang berlaku berupa indeks harga konsumen.

Kas dan piutang dagang tidak perlu disesuaikan dengan perubahan daya beli, tetapi pada laporan keuangan yang dibandingkan perlu adanya kesamaan daya beli. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Angka indeks pada tahun I}}{\text{Angka indeks pada tahun dasar}} \times \text{kas / piutang dagang}$$

Persediaan dikonversikan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Angka indeks pada tahun ini}}{\text{Angka indeks saat perolehan}} \times \text{harga perolehan persediaan}$$

Besarnya harga perolehan persediaan tergantung dengan metode yang digunakan (FIFO, LIFO, Rata-rata, dan lain-lain) dan penggunaan metode tersebut harus konsisten.

Pembayaran dimuka (*prepayment*) disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan perubahan daya beli saat dilakukan pembayaran. Nilai konversinya adalah :

Angka indeks pada tahun ini  
\_\_\_\_\_ x pembayaran dimuka  
Angka indeks saat pembayaran

Investasi disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan perubahan daya beli saat investasi terjadi. Penyajiannya adalah sebesar :

Angka indeks pada tahun ini  
\_\_\_\_\_ x nilai investasi  
Angka indeks saat investasi terjadi

Aktiva tetap dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan perubahan daya beli saat aktiva tersebut dimiliki. Besarnya nilai konversi adalah :

Angka indeks pada tahun ini  
\_\_\_\_\_ x harga perolehan aktiva tetap  
Angka indeks saat aktiva dimiliki

Hutang lancar tidak perlu dinilai kembali karena sudah secara langsung mengikuti perubahan daya beli kecuali apabila ingin dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya.

Kontrak pemeliharaan/langganan (*advances on maintenance contracts*) diukur dengan nilai konversi sebesar :

Angka indeks pada tahun ini  
\_\_\_\_\_ x kas yang dibayar  
Angka indeks selama masa pemeliharaan

Hutang jangka panjang tidak perlu dinilai kembali karena sudah secara langsung mengikuti daya beli kecuali apabila ingin dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya.

(*tax savings*) dan disajikan dalam laporan keuangan setelah disesuaikan dengan perubahan daya beli sebesar nilai yang akan dibayar, sehingga pajak yang ditanggung tidak perlu lagi disesuaikan dengan perubahan daya beli.

Pajak yang ditangguhkan (*differed income taxes*) dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah akumulasi dari penghematan pajak

Modal saham preferen dapat digolongkan sebagai elemen

moneter dan elemen non moneter tergantung keadaannya. Modal saham biasa diukur dengan selisih antara total aktiva yang telah disesuaikan dengan perubahan daya beli dengan total hutang yang telah disesuaikan dengan perubahan daya beli ditambah modal saham preferen.

Pendapatan dan biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu elemen moneter dan non moneter. Sifat dari akun-akun tersebut menjadi dasar dalam pengklasifikasiannya. Laporan keuangan yang telah disusun dengan metode *general price-level accounting* dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun dengan *historical cost accounting*. Kedua laporan keuangan dianalisis dengan menggunakan NOD (*number of dollar*) *attribute* untuk mengetahui bahwa laporan keuangan tersebut interpretatif dan dianalisis dengan COG (*common over good*) *attribute* untuk mengetahui bahwa laporan keuangan tersebut relevan.

Dari hasil analisis tersebut selanjutnya dilakukan analisa. Elemen laporan keuangan dikatakan relevan > 16 unit dan interpretatif bila selisih elemen yang telah disusun berdasarkan dollar konstan dibagi dengan selisih unit sama dengan indeks harga konsumen. Apabila persentase elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sesuai dengan NOD *attribute* dan COG *attribute* > 50%, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan interpretatif dan relevan.

#### D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pada masa inflasi, laporan keuangan GPLA lebih informatif dibanding *historical cost*, namun material atau tidaknya perbedaan yang ditimbulkan GPLA tergantung pengaruhnya terhadap perusahaan tersebut, sehingga GPLA bukan dimaksudkan untuk mengganti laporan keuangan *historical cost*, tetapi hanya sebagai *supplement report* untuk digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan sehingga tujuan dari pelaporan akuntansi terpenuhi. Hal ini didasari oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia bahwa informasi tambahan antara lain mengenai pengungkapan pengaruh di perubahan harga bersifat tidak mengikat.

#### E. REFERENSI

- Ainun, Na'im. 2001. *Akuntansi Inflasi*. Edisi 4. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Atmadja, Adwin S. 1999. *Inflasi Di Indonesia: Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1. No. 1. Hal. 54-67. Universitas Kristen Petra. Jakarta.
- Badriwan, Zaki. 2000. *Intermediate Accounting*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Indonesia*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.

- Kodrat, David Sukardi. 2006. *Studi Banding Penyusunan Laporan Keuangan dengan Metode Historical Cost Accounting dan General Price-Level Accounting pada Masa Inflasi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 8. No. 2. Hal. 78-91. Universitas Kristen Petra. Jakarta.
- Leng, Pwee. 2002. *Analisis Terhadap Perlunya Penyesuaian Laporan Keuangan Historis (Convensional Accounting) Menjadi Berdasarkan Tingkat Harga Umum (General Price-Level Adjustment)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4. No. 2. Hal. 141-155. Universitas Kristen Petra. Jakarta.
- Schroeder, Richard G. dan Clark, Myrtle. 1995. *Accounting Theory: Text and Reading*. John Willey & Sons. New York.
- Sundjaja, Ridwan S. dan Barlian, Inge. 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi 5. Literata Lintas Media. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi 2. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.